

**FACTORS WHICH AFFECT PEOPLE WELFARE LEVEL
IN SEVEN ENLARGING PROVINCES IN INDONESIA**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TUJUH PROVINSI PEMEKARAN
DI INDONESIA¹**

Rasbin²

Naskah diterima tanggal 16 Desember 2012,
disetujui tanggal 5 Februari 2012

Abstract

The objective of the enlargements of provinces in Indonesia is to create a better level of people welfare. This study is aimed to examine what factors influence the level of people welfare in the enlarging provinces in the country. Applying econometric panel data analysis and data from 2007-2010, the results of the study indicated that the level of the people welfare in the researched provinces is significantly affected by the provinces' economic growth and the length of people participation in schools. Meanwhile, government spending on education and health did not significantly affect the welfare of the people in the enlarging provinces.

Keywords: people welfare, enlarging provinces, econometric panel data analysis

Abstrak

Inti dari pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk menciptakan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang

¹Tulisan ini telah dipresentasikan dalam Workshop Bulletin of Monetary Economic and Banking: The Macroeconomic and Financial Resilience of Asian Emerging Market Amid The Global Crisis tanggal 6 September 2012 di Bank Indonesia.

²Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung DPR RI Nusantara 1 Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Indonesia. Telp. 021-5715891. E-mail: ras9bin@yahoo.co.id.

mempengaruhi tingkat kesejahteraan di provinsi pemekaran. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrik panel data dan menggunakan data dari 2007 sampai 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di provinsi pemekaran secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat provinsi pemekaran secara signifikan.

Kata Kunci: tingkat kesejahteraan masyarakat, provinsi pemekaran, analisis panel data ekonometrik

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setelah tumbanganya Orde Baru, Indonesia memasuki suatu orde yang disebut Orde Reformasi. Dalam orde tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998 yakni Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah kemudian diamandemen menjadi PP Nomor 78 Tahun 2007.

Setelah terbitnya UU dan PP tersebut, sampai dengan tahun 2010 telah terbentuk 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Beragam alasan mengiringi terbentuknya daerah-daerah baru tersebut. Pemekaran daerah merupakan salah satu terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.³ Tujuan pemberian otonomi

³D. Harmantyo, 2011, "Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia", (<http://geografi.ui.ac.id/portal/desentralisasi-otonomi-pemekaran-daerah-dan-pola-perkembangan-wilayah-di-indonesia/>, diakses tanggal 10 Januari 2012).

daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.⁴ Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.⁵

Beberapa indikator dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat pendidikan, kesehatan, kecukupan pangan dan atau keterbebasan dari kemiskinan. Indikator-indikator tersebut menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kepuasannya.⁶ Selain itu, beberapa literatur menyebutkan bahwa indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yang paling banyak digunakan adalah pendapatan per kapita. Indikator-indikator tersebut memiliki arti penting untuk mengetahui hasil atau dampak dari pembangunan dalam hal ini melalui pemekaran daerah. Berikut ini merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kepuasan adalah keterbebasan dari kemiskinan. Artinya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai karena kebutuhan dasar terpenuhi yang didukung oleh lingkungannya agar keluar dari kerentanan tersebut.⁷ Persentase kemiskinan di tujuh provinsi hasil pemekaran dapat dilihat pada Tabel 1.

⁴M. Sidik, *et.al*, *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.

⁵H.R. Syaukani, A. Gaffar dan R. Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

⁶J. Suryanto dan E. Soesilowati, "Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Empat Provinsi Pemekaran", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. XVI (2), 2008, hal.93.

⁷A. Cahyat, C. Gonner dan M. Haug, "Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia", *Center for International Forestry Research*, 2007.

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (Sept)
Ba-Bel	9,54	8,58	7,46	6,51	5,75	5,37
Kep. Riau	10,30	9,18	8,27	8,05	7,40	6,83
Banten	9,07	8,15	7,64	7,16	6,32	5,71
Gorontalo	27,35	24,88	25,01	23,19	18,75	17,22
Sulawesi Barat	19,03	16,73	15,29	13,58	13,89	13,01
Maluku Utara	11,97	11,28	10,36	9,42	9,18	8,06
Papua Barat	39,31	35,12	35,71	34,88	31,92	27,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007-2012.

Berdasarkan data pada Tabel 1, secara umum persentase kemiskinan di tujuh provinsi pemekaran setelah provinsi-provinsi tersebut terbentuk terus mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai 2012. Persentase kemiskinan terendah pada tahun 2012 diperoleh Provinsi Bangka Belitung yakni sebesar 5,37 persen dibandingkan tahun 2007 sebesar 9,54 persen. Sedangkan persentase kemiskinan tertinggi pada tahun 2012 diperoleh Provinsi Papua Barat yakni sebesar 27,04 persen dibandingkan tahun 2007 sebesar 39,31 persen.

Selain berdasarkan penurunan persentase kemiskinan, indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah persentase penduduk yang buta huruf. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selain indikator angka melek huruf. Semakin rendah persentase penduduk buta huruf maka semakin tinggi kualitas dari SDM tersebut. Persentase penduduk buta huruf di tujuh provinsi pemekaran dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan data pada Tabel 2, secara umum persentase penduduk buta huruf di tujuh provinsi pemekaran terus mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai 2010. Pada tahun 2010, untuk kelompok umur 15 tahun keatas, persentase penduduk buta huruf terendah terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 2,81 persen sedangkan yang tertinggi pada Provinsi Sulawesi Barat (11,52 persen). Persentase penduduk buta huruf terendah, tahun 2010 untuk kelompok umur 15-44, terjadi pada Provinsi Maluku Utara yakni sebesar 0,59 persen sedangkan yang tertinggi pada Provinsi Sulawesi Barat (4,94 persen). Persentase penduduk buta huruf terendah, tahun 2010 untuk kelompok umur 44 tahun keatas, terjadi pada Provinsi Papua Barat yakni sebesar 10,37 persen sedangkan yang tertinggi pada Provinsi Sulawesi

Barat (29,29 persen). Secara umum, persentase penduduk buta huruf tertinggi terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2
Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Tahun
2006-2010

Prov.	15+					15-44					44+				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Kepri	4,71	4,33	4,19	3,92	2,81	1,94	1,76	1,57	0,94	0,65	15,34	15,12	12,6	12,53	11,12
Babel	5,14	5,13	4,66	4,59	4,54	2,09	2,59	1,61	0,86	0,65	12,99	11,46	12	13,25	14,03
Banten	4,99	4,76	4,79	4,05	3,80	1,74	2,06	1,02	0,85	0,67	14,99	12,94	15,15	13,23	13,01
Gorontalo	4,30	4,25	4,49	4,29	4,00	3,06	3,35	1,84	1,86	1,30	7,75	6,63	11,01	9,91	10,58
Sulbar	14,1	13,6	12,69	12,41	11,52	7,57	7,52	6,70	5,48	4,94	31,57	29,91	28,82	29,43	29,29
Malut	5,59	5,35	4,56	4,26	3,92	2,69	2,33	1,15	0,85	0,59	14,25	14,63	14,70	13,24	13,11
Pabar	11,45	9,68	7,85	7,06	5,17	7,95	7,60	5,58	5,01	3,55	22,65	17,15	16,15	13,40	10,37

Keterangan: Kepri=Kepulauan Riau, Babel=Bangka Belitung, Gorontalo=Gorontalo, Sulbar=Sulawesi Barat, Malut=Maluku Utara, Pabar=Papua Barat
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006-2010.

Indikator tingkat kesejahteraan, selain berdasarkan persentase kemiskinan dan penduduk buta huruf, juga bisa dilihat dari tingkat kecukupan pangan. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan. Kalau kemampuan berkonsumsi pangan meningkat maka masyarakat dapat membeli pangan dengan kuantitas lebih banyak atau meningkatkan kualitas pangan yang dibeli. Jika tingkat kecukupan pangan terpenuhi dan meningkat maka standar hidup masyarakat yang juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi dan meningkat juga.

Berdasarkan Laporan BPS, Provinsi Banten dan Kepulauan Riau memiliki rata-rata konsumsi protein per kapita per hari di atas rata-rata konsumsi protein per kapita per hari secara nasional (56,25 gram) yakni 59,20 dan 57,06 gram. Sedangkan provinsi-provinsi pemekaran lainnya masih dibawah rata-rata secara nasional yakni Provinsi Sulawesi Barat (56,11 gram), Bangka Belitung (54,90 gram), Gorontalo (52,85 gram), Papua Barat (48,97 gram), dan Maluku Utara (45,81 gram).

Selain berdasarkan rata-rata konsumsi protein, tingkat kecukupan pangan juga bisa dilihat dari rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari. Berdasarkan Laporan BPS, Provinsi Banten dan Sulawesi Barat memiliki rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari di atas rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari secara nasional sebesar 1952,04 kilo kalori (kcal) yakni 1987,55 dan 1975,05 kkal. Sedangkan provinsi-provinsi pemekaran lainnya masih di bawah rata-rata secara nasional yakni Provinsi Kepulauan Riau (1895,49 kkal),

Gorontalo (1882,41 kkal), Papua Barat (1856,40 kkal), Bangka Belitung (1831,20 kkal), dan Maluku Utara (1780,10 kkal).

Pendapatan per kapita merupakan indikator pembangunan (indeks kesejahteraan) yang paling banyak digunakan untuk memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di suatu negara ataupun provinsi. Karena anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Biasanya indeks ini diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan nilai PDRB merupakan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah.⁸ Pendapatan per kapita di tujuh provinsi pemekaran di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
PDRB Per Kapita di Tujuh Provinsi Pemekaran di Indonesia, 2006-2010

Provinsi	PDRB Per Kapita Berdasar Harga Berlaku					PDRB Per Kapita Berdasar Harga Konstan 2000				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Babel	14,60	16,17	19,08	20,19	21,01	8,30	8,55	8,82	9,02	8,88
Kepri	34,62	37,21	40,31	42,17	42,65	24,30	24,92	25,47	25,29	24,47
Banten	10,58	11,41	14,57	15,54	16,04	6,63	6,90	8,30	8,53	8,31
Gorontalo	4,28	4,96	6,08	7,18	7,75	2,29	2,44	2,59	2,75	2,80
Sulbar	5,12	6,09	8,04	8,97	9,48	3,32	3,51	3,87	4,05	4,09
Malut	3,03	3,35	4,02	4,81	5,19	2,54	2,65	2,76	2,88	2,92
Pabar	12,74	14,48	19,15	23,14	29,62	7,90	8,29	8,77	9,21	11,42

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah).

Berdasarkan Tabel 3, secara umum PDRB per kapita di tujuh provinsi pemekaran di Indonesia terus mengalami peningkatan baik berdasar harga berlaku maupun harga konstan 2000. Pada tahun 2010, PDRB per kapita berdasar harga berlaku yang tertinggi diperoleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 42,17 Juta sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 4,81 Juta. Berdasar harga konstan 2000, PDRB per kapita tertinggi tahun 2010 juga diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan besaran Rp 24,47 Juta sedangkan yang terendah adalah Provinsi Gorontalo sebesar Rp 2,80 Juta.

Indikator yang lebih lengkap untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia

⁸Toddy, "Indikator Kesejahteraan Umum" (www.bappeda.pekanbaru.go.id/artikel/8/indikator-kesejahteraan-umum/page/1/ diakses tanggal 8 Februari 2012).

(IPM). Karena IPM dapat menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sosial sekaligus. IPM merupakan ukuran yang menjelaskan berbagai indikator yang ada dimana indeks ini berguna untuk menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat.⁹ Indeks ini merupakan ukuran agregat pembangunan manusia yang meliputi indikator angka harapan hidup, pendidikan, dan paritas daya beli. Tabel 4 menyajikan perkembangan IPM pada tujuh provinsi pemekaran tahun 2004-2010. Indeks ini untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia antarprovinsi tersebut.

Tabel 4
Perkembangan IPM Pada Tujuh Provinsi Pemekaran Tahun 2004-2010

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kepulauan Riau	70,8	72,23	72,79	73,68	74,18	74,54	75,07
Bangka Belitung	69,6	70,68	71,18	71,62	72,19	72,55	72,86
Banten	67,9	68,80	69,11	69,29	69,70	70,06	70,48
Gorontalo	65,4	67,46	68,01	68,83	69,29	69,79	70,28
Sulawesi Barat	64,4	65,72	67,06	67,72	68,55	69,18	69,64
Maluku Utara	66,4	66,95	67,51	67,82	68,18	68,63	69,03
Papua Barat	63,7	64,83	66,08	67,28	67,95	68,58	69,15
Indonesia	68,7	69,57	70,1	70,59	71,17	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004-2010.

Berdasarkan Tabel 4, indeks IPM provinsi-provinsi pemekaran terus mengalami peningkatan. Dibandingkan provinsi-provinsi pemekaran lainnya, Provinsi Kepulauan Riau memperoleh indeks IPM tertinggi antara tahun 2004-2010. Artinya dibandingkan enam provinsi pemekaran lainnya, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan prestasi pembangunan manusia tertinggi. Sedangkan prestasi pembangunan manusia terendah diperoleh Provinsi Papua Barat.

B. Perumusan Masalah

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran terus mengalami peningkatan baik berdasarkan indikator tingkat pendidikan, kecukupan pangan, keterbebasan dari kemiskinan, pendapatan

⁹*Ibid.*

per kapita maupun indeks IPM. Indeks IPM ini merupakan salah satu indikator yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat meng-cover indikator-indikator kesejahteraan lainnya. Indeks IPM provinsi-provinsi pemekaran terus mengalami peningkatan. Meningkatnya indeks ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah tingkat partisipasi pendidikan, pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya tingkat kesejahteraan (dalam hal ini diproksi oleh IPM) masyarakat di tujuh provinsi pemekaran di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka studi ini mencoba menganalisis secara teoritis dan empiris faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

D.1. Tinjauan Teoritis Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satunya diukur dari persoalan ekonomi yakni melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut paradigma tradisional, pembangunan ekonomi diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi hanya merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan.¹⁰

Salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan, menurut paradigma tradisional, dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional (GNP) per kapita riil. Indikator tersebut merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi. Dengan syarat, tingkat

¹⁰M. Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010, hal.2.

pertumbuhan GNP dalam harga konstan harus lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan penduduk.¹¹

Walaupun begitu, indikator GNP per kapita riil tidak dapat menunjukkan kondisi kesejahteraan yang sebenarnya.¹² Karena, indikator tingkat kesejahteraan dengan menggunakan GNP per kapita riil mempunyai banyak kelemahan.¹³ Di antaranya adalah tidak memasukkan produksi yang tidak melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu rumah tangga, transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan, dan masalah distribusi pendapatan.

Pembangunan ekonomi tidak lagi memfokuskan GNP sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Namun, dengan upaya meniadakan, atau setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah "garis kemiskinan absolut" tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.¹⁴

Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia.¹⁵ Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai indeks *purcashing power parity* (PPP).

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk dimana didalamnya ada komponen PDRB. Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam PDRB per kapita, tetapi juga dapat dilihat melalui pencapaian di sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan.¹⁶

Indeks IPM ini merupakan indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur

¹¹*Ibid* hal. 1.

¹²T.T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009.

¹³M. Kuncoro, *Op.Cit.* at 15.

¹⁴M. Kuncoro, *Op.Cit.* at 9.

¹⁵J. Suryanto dan E. Soesilowati, *Loc. Cit.* 91.

pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah.¹⁷ Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

Dalam IPM terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan penghasilan. Lamanya hidup yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Pengetahuan diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah. Penghasilan diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan.¹⁸

Ketiga unsur dalam IPM tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Indeks ini akan menentukan tingkat kesejahteraan individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam IPM tercantum tujuan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia.¹⁹ Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengubah faktor-faktor yang tercantum dalam IPM tersebut. Seperti kebijakan meningkatkan tingkat harapan hidup dengan meningkatkan belanja untuk sektor kesehatan. Atau belanja untuk sektor pendidikan, dengan tujuan agar tingkat pengetahuan masyarakat meningkat.

D.2. Studi Empiris

Sejauh ini, penelitian tentang kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah hasil pemekaran sudah banyak dilakukan. Secara umum, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, apakah dengan pemekaran daerah tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi pemekaran mengalami peningkatan dari sebelumnya. Atau sama bahkan mengalami penurunan dari sebelumnya pada waktu masih bergabung dengan provinsi induk.

¹⁶Toddy, *Loc. Cit.*

¹⁷UNDP, 2004.

¹⁸M. Kuncoro, *Loc. Cit.*, 18.

¹⁹F.A. Christy dan Adi P.H, "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia". The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009.

Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Suryanto dan Soesilowati (2008) yang bertujuan untuk melihat kinerja ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di empat provinsi pemekaran, yaitu Provinsi Banten, Bangka Belitung, Gorontalo dan Kepulauan Riau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan di empat provinsi pemekaran mengalami peningkatan dan lebih baik dibandingkan daerah induk (provinsi asal). Selain itu, besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat diamati melalui peningkatan IPM.

Ada juga Lembaga Administrasi Negara atau LAN (2005) yang melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk periode 1999-2003. Studi ini dilakukan di 136 kabupaten/kota dan menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat, khususnya dilihat dari indikator ekonomi dan sosial secara umum, mengalami peningkatan. Namun demikian, tetap terjadi kesenjangan antara wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Salah satu input dalam evaluasi ini adalah indeks pembangunan manusia.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Abdullah (2011) yang mengkaji dampak dari pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitiannya, dampak pemekaran wilayah dapat dilihat dari beberapa kriteria. Dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan ekonomi lebih baik daripada perbandingan jumlah penduduk miskin. Selain itu juga, digunakan laju pertumbuhan PDRB Non Migas.

Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang melakukan evaluasi terhadap dampak pemekaran daerah pada periode 2001-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi daerah-daerah pemekaran yang menjadi cakupan wilayah studi, secara umum masih tetap berada di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol. Pertumbuhan ekonomi lebih fluktuatif dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan terus meningkat. Selain itu, penduduk miskin banyak terkonsentrasi di daerah hasil pemekaran.

E. Metode Penelitian

Bagian ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian. Juga model empiris yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tujuh provinsi pemekaran di Indonesia. Lebih dalam, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, merupakan bentuk perhitungan matematis dan statistik yang

didasarkan atas teori ekonomi atau dapat disebut sebagai metode ekonometrika G-to-S (*General to Specific*).²⁰

E.1. Model Empiris

Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada komponen-komponen IPM yang dikembangkan oleh UNDP yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Dimana indikator-indikator tersebut menggunakan 3 dimensi dasar. *Pertama*, lamanya hidup yang diukur dengan tingkat harapan hidup. *Kedua*, pengetahuan diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah. *Ketiga*, Penghasilan diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan.²¹

Kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada 3 indikator tersebut akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini melalui IPM). Seperti belanja pemerintah yang dilakukan untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur-infrastruktur untuk sarana kegiatan perekonomian, dan sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebut, model empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$IPM_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 * \text{Log}(PDRB_{it}) + \alpha_3 * \text{Log}(GE_{it}) + \alpha_4 * \text{Log}(GH_{it}) + \alpha_5 TPP_{it} + \varepsilon_{it}$$

dimana *IPM* merupakan proksi untuk tingkat kesejahteraan masyarakat, *PDRB* merupakan proksi untuk tingkat pertumbuhan ekonomi, *GE* adalah pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, *GH* adalah pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan, dan *TPP* adalah tingkat partisipasi pendidikan masyarakat. Sedangkan *subskrip i* menunjukkan individu yakni tujuh provinsi hasil pemekaran dan *subskrip t* menunjukkan periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini.

E.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* dan *cross section*. Data *time series* dimulai dari tahun 2007 hingga 2010, sedangkan data *cross section* meliputi tujuh provinsi pemekaran yakni Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

²¹M. Kuncoro, *Loc. Cit.*, 18.

²²J. Suryanto dan E. Soesilowati, *Loc. Cit.*, 92-93.

E.3. Definisi Operasional Variabel dan Hipotesis

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (diproksi dengan IPM) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya meliputi variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan, dan tingkat partisipasi pendidikan.

a. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (*basic needs*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Ada juga yang mendefinisikan sebagai tingkat aksesibilitas seseorang dalam kepemilikan faktor-faktor produksi yang dapat dimanfaatkan dalam suatu proses produksi sehingga diperoleh imbalan bayaran (*compensations*) dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Perubahan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan perubahan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.²²

Dalam penelitian ini, tingkat kesejahteraan masyarakat diproksi dengan IPM.²³ Indeks ini sebagai penilaian yang bersifat komposit atas perkembangan konsumsi, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diamati melalui perkembangan IPM.²⁴

b. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuka kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan seseorang itu meningkat maka orang tersebut akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan primernya sehingga tingkat kesejahteraannya akan meningkat. Dengan kata lain, pendapatan akan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dalam penelitian ini, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan nilai PDRB harga konstan 2000. Sebab dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan sehingga perubahan nilai PDRB menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan.²⁵

²³Direktorat Kewilayahan 1, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, www.bappenas.go.id.

²⁴J. Suryanto dan E. Soesilowati, *Loc. Cit.*, 93.

²⁵"Bab X Pertumbuhan Ekonomi", (http://www.scribd.com/%D8%ADs_mangat/d/69241834/45-B-Pentingnya-Pertumbuhan-Ekonomi), (http://www.scribd.com/%D8%ADs_mangat/d/69241834/45-B-Pentingnya-Pertumbuhan-Ekonomi diakses 3 April 2012).

c. Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Melalui pendidikan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menggali potensinya demi memperoleh kehidupan yang lebih layak sehingga dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Tapi tidak semua orang mempunyai biaya untuk sekolah. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan akan memberikan banyak peluang kepada masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, untuk bersekolah. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk melanjutkan sekolah sehingga akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan. Karena itu, kesehatan adalah kebutuhan sangat dasar bagi setiap manusia. Tapi, tidak semua orang memiliki biaya untuk selalu menjaga kesehatannya. Misalnya biaya untuk pengobatan penyakit yang dideritanya atau membeli obat di apotek. Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan akan membantu masyarakat untuk selalu menjaga kesehatannya seperti pengobatan gratis melalui Program JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

e. Tingkat Partisipasi Pendidikan

Pendidikan, selain kesehatan, merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas orang tersebut. Dalam penelitian ini, tingkat partisipasi pendidikan diproksi dengan menggunakan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 15 tahun ke atas.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan membuka kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Jika pendapatan seseorang meningkat maka orang tersebut akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan primernya sehingga tingkat kesejahteraannya akan meningkat.

- b. Belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk melanjutkan sekolah sehingga akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- c. Belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan akan membantu masyarakat untuk selalu menjaga kesehatannya sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

- d. Tingkat partisipasi pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas orang tersebut. Akhirnya, tingkat kesejahteraannya akan meningkat.

E.4. Metode Estimasi

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah ekonometrika panel data. Ekonometrika panel data adalah salah satu metode dalam ekonometrika yang menggabungkan antara data *time series* dan *cross section*. Panel data memiliki keuntungan-keuntungan dibandingkan data *cross-section* atau *time series* yaitu: (a) Teknik estimasi panel data dapat mengatasi masalah heterogenitas yang timbul akibat beragamnya individu dari waktu ke waktu; (b) Panel data dapat memberikan lebih banyak informasi, variasi dan *degree of freedom*, tapi sedikit kolinearitas dan lebih efisien; (c) Panel data sangat tepat untuk mempelajari dinamika perubahan karena observasi *cross-section* dipelajari secara berulang-ulang; (d) Panel data paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *cross-section* atau *time-series* murni; (e) Panel data memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit; dan (f) Panel data dapat meminimumkan bias yang bisa terjadi jika persamaan diestimasi secara individu.²⁶

²⁶D.N.Gujarati dan D.C.Porter, *Dasar-dasar Ekonometrika: Buku 2 Edisi 5, Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Dalam estimasi panel data, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan yaitu *common effects* atau *ordinary least squares (OLS) pooled*, *fixed effects* dan *random effects*. Dalam penelitian ini akan digunakan salah satu dari pendekatan tersebut. Untuk menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, digunakan uji-uji empiris.

a. Uji F Terbatas

Uji F terbatas²⁷ ini digunakan untuk memilih antara pendekatan *common effects* dan *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Statistik F adalah H_0 : *common effects*; dan H_a : *fixed effects*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara pendekatan *fixed effects* dan *random effects*. Dimana hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah H_0 : *random effects* dan H_a : *fixed effects*. Untuk Uji Hausman langsung dilakukan menggunakan program *software* komputer Eviews versi 6.0.

Pengolahan data untuk mengestimasi model persamaan ekonometrik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program *software* komputer Eviews versi 6.0. Untuk menguji variabel independen secara bersama-sama digunakan Uji F, sedangkan untuk menguji variabel independen secara individual digunakan Uji t.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Analisis Hasil Estimasi

Model ekonometrika yang akan diuji dalam penelitian ini adalah model persamaan (1). Menggunakan perangkat lunak *Eviews 6.0*, hasil dari olahan data panel model persamaan (1) dapat dilihat pada Tabel 5 baik pendekatan *fixed effect* maupun *random effect*.

²⁷Rumus Uji F terbatas yang digunakan adalah $F = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k)}$, dimana R_{UR}^2 adalah R^2 untuk

fixed effects, R_R^2 adalah R^2 untuk *common effects*, m adalah jumlah restriksi, n adalah banyaknya observasi dan k adalah jumlah parameter dalam *fixed effects*. Dari Uji F ini dihasilkan nilai F-Hitung atau F-Statistik, kemudian nilai ini dibandingkan dengan nilai F-Tabel. F-Tabel diperoleh dari Tabel Distribusi F dengan rumus $F(\alpha, m, n-k)$ dimana m adalah numerator sedangkan $(n-k)$ adalah denominator.

Tabel 5
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan di Tujuh Provinsi Pemekaran

Variabel	Fixed Effect			Random Effect		
	Coeff.	t-Stat	Prob.	Coeff.	t-Stat	Prob
Dependent Variable: IPM						
C	-7,04	-0,65	0,524	33,69	5,26	0,000*
Log(GE)	0,0051	0,016	0,988	0,16	0,42	0,681
Log(GH)	0,031	0,095	0,925	-0,077	-0,20	0,844
Log(PDRB)	4,735	6,865	0,000*	2,011	6,927	0,000*
TPP	0,112	5,853	0,000*	0,419	5,572	0,000*
Adj-R ²	0,994			0,842		
Prob(F-Stat)	0,000*			0,000*		
DW-stat	2,176			1,574		

Sumber : data diolah Eviews 6.0

Keterangan : *Signifikan pada 99% Confidence Level

Berdasarkan Tabel 5, kinerja model dengan pendekatan *fixed effect* tampak lebih bagus dibandingkan pendekatan *random effect* untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan di tujuh provinsi pemekaran di Indonesia. Jika dibandingkan dengan pendekatan *fixed effect*, dalam pendekatan *random effect* ada satu variabel yang menyimpang tandanya dari yang diharapkan yakni variabel pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan (GH). Pendekatan *random effect* menghasilkan koefisien regresi variabel GH yang bertanda negatif (-0,0767), yang bermakna bila pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran di Indonesia akan menurun, begitu pula sebaliknya. Kesimpulan semacam ini bertentangan dengan teori.

Berdasarkan analisis ekonometrika, pemilihan pendekatan dalam model panel data juga didasarkan atas uji secara teoritis dengan melalui tahapan-tahapan pengujian. *Pertama*, adalah pengujian melalui uji F terbatas. Berdasarkan uji F terbatas ini, pendekatan estimasi panel data yang dipilih adalah pendekatan *fixed effect*. *Kedua*, karena pendekatan *fixed effect* yang dipilih maka dilanjutkan dengan uji *Hausman* untuk memilih antara pendekatan *fixed effect* atau *random effect*. Berdasarkan uji *Hausman* dipilih pendekatan *random effect*. Tapi karena *standard error* dalam uji *Hausman-test* tidak konsisten dengan asumsi varian *Hausman Test* maka pendekatan panel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fixed effect*, selain disebabkan oleh tanda dari parameter-parameter dalam pendekatan *fixed*

effect sesuai dengan teori dibandingkan pendekatan *random effect*. Hasil uji Statistik F dan *Hausman Test* dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Statistik F dan Hausman

Jenis Pengujian	F-Statistik	F-Tabel	Kesimpulan
Uji F	348,8	2,74	<i>Fixed effect</i>
	<i>Hausman Stat</i>	<i>Hausman Tabel</i>	Kesimpulan
Uji <i>Hausman</i>	0,000	4	<i>Random Effect</i>
Catatan: <i>cross-section test variance is valid, robust standard errors may not be consistent with assumption of Hausman test variance calculation</i>			

Sumber: data diolah dengan *Eviews 6.0*

Berdasarkan analisis ekonometrika dan *sign-test* dengan teori-teori ekonomi, maka pendekatan *random effect* dipilih untuk menginterpretasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran di Indonesia.

Berdasarkan uji F atau uji pengaruh bersama-sama variabel independen, hasil estimasi pengaruh variabel PDRB (lihat Tabel 5, pendekatan *random effect*), pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan dan tingkat partisipasi pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan angka signifikan dengan probabilitas ($F\text{-stat} = 0,0000 < \alpha(0,05)$). Ini artinya, secara bersama-sama variabel PDRB, pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan dan tingkat partisipasi pendidikan dalam model secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran. Nilai R^2 *adjusted* sebesar 0,842 artinya model secara representatif dapat menjelaskan keragaman variabel dependen sebesar 84,2 persen. Dalam metode estimasi panel data sering mengandung masalah heteroskedastisitas, tapi dalam estimasi ini tidak mengandung masalah tersebut. Karena model ini diestimasi menggunakan Metode GLS *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance*, sehingga diasumsikan model sudah bersifat homoskedastisitas.

Tanda koefisien dari masing-masing variabel sesuai dengan teori ekonomi, kecuali belanja pemerintah bidang kesehatan tapi pengaruhnya tidak signifikan. Variabel tingkat partisipasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki tanda positif dan signifikan pada 99 persen *significance level*.

Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan walaupun tandanya sudah sesuai dengan teori ekonomi tetapi variabel ini tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil regresi persamaan (1) menggunakan pendekatan *random effect* dapat dilihat dibawah.

$$IPM_t = 33,69 + 0,16 * \text{Log}(GE_t) - 0,077 * \text{Log}(GH_t) + 2,011 * \text{Log}(PDRB_t) + 0,419 * TPP_t$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi pendidikan secara signifikan, sedangkan belanja pemerintah untuk bidang kesehatan dan pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran. Nilai koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 2,011 dan signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran pada $\alpha = 1$ persen. Artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menaikkan IPM sebesar 0,673 persen.²⁸ Studi ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Brata (2002). Brata (2002) dalam penelitiannya, menemukan pengaruh yang positif dari PDRB terhadap IPM sebesar 14,781.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sektor industri yang dinamis dapat tercipta sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan akhirnya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Peningkatan penghasilan menyebabkan masyarakat banyak mendapatkan sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya.²⁹

Hipotesis dampak merembes ke bawah (*trickle down effect*) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke pembangunan manusia (pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat

²⁸Nilai ini diperoleh dari rumus: $\frac{\Delta Y}{Y}$, dimana nilai Y digunakan adalah nilai variabel dependen rata-rata. Dalam penelitian ini, nilai variabel dependen rata-ratanya adalah sebesar 81,321. Karena persamaan ekonometrika yang digunakan berbentuk semilog/linier-log, misalnya

$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}(X_t) + e_t$. Artinya setiap kenaikan variabel X sebesar 1 persen akan menaikkan variabel Y sebesar $\frac{\beta_1}{Y}$ persen.

²⁹ "Metodologi Penelitian", (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/52191/BAB%20III%20Metodologi%20Penelitian.pdf?sequence=5>, diakses 3 April 2012).

akan meningkat). Jika hipotesis *trickle down* ini digabungkan dengan hipotesis *cruel choice* dimana hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan hubungan linier yang searah (*unidirectional*) dimana kekuatan penggeraknya adalah pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2010).

Tingkat partisipasi pendidikan (TPP) secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran. Nilai koefisien dari variabel TPP sebesar 0,419 dan signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh provinsi pemekaran pada $\alpha = 1$ persen. Artinya setiap kenaikan lama sekolah sebesar 1 tahun akan menaikkan IPM sebesar 0,419 poin. Studi ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Brata (2002). Brata (2002) menemukan pengaruh yang positif dari tingkat partisipasi pendidikan terhadap IPM sebesar 17,9.

Melalui pendidikan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menggali potensinya demi memperoleh kehidupan yang lebih layak. Tingkat pendidikan yang tinggi memberikan bekal keahlian terhadap seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan sehingga tingkat kesejahteraan orang tersebut akan meningkat.

Berdasarkan Teori *Human Capital*, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Para penganut Teori *Human Capital* berpendapat bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non moneter. Manfaat non moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan.

2.2. Analisis Cross Section

Berdasarkan angka koefisien *cross section*, disebutkan bahwa apabila variabel-variabel independen tidak mengalami perubahan atau dianggap konstan, maka hanya ada 5 provinsi yang mempunyai tingkat kesejahteraan (yang diproksi dengan IPM) lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Barat. Keempat provinsi tersebut mempunyai IPM masing-masing lebih tinggi sebesar 2,1063; 2,1619; 0,9113; 0,5646 dan 0,5753 poin bila dibandingkan dengan angka IPM nasional. Nilai koefisien *cross section* untuk tujuh provinsi pemekaran dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Koefisien Cross Section Tujuh Provinsi Pemekaran

Provinsi	Nilai Koefisien
Bangka Belitung	2,1063
Banten	-4,7900
Gorontalo	2,1619
Kepulauan Riau	0,9113
Maluku Utara	0,5646
Papua Barat	-1,5292
Sulawesi Barat	0,5753

Sumber: data diolah *Eviews 6.0*

Seandainya besaran IPM nasional rata-rata sebesar 70 maka dianggap IPM untuk Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Barat masing-masing sebesar 72,1063; 72,1619; 70,9113; 70,5646 dan 70,5753. Sedangkan dua provinsi pemekaran lainnya mempunyai angka IPM yang lebih rendah dibandingkan IPM nasional. Dimana provinsi yang paling rendah adalah Provinsi Banten yakni sebesar 65,21.

III. Kesimpulan

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu proses pembangunan. Penelitian ini mendukung teori dan studi empiris yang pernah dilakukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat (yang diproksi dengan IPM) dipengaruhi secara positif oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan lamanya penduduk bersekolah. Tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi hasil pemekaran di Indonesia selama periode 2007-2010 dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan lamanya penduduk bersekolah. Sedangkan variabel belanja pemerintah untuk bidang kesehatan dan pendidikan tidak signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di provinsi hasil pemekaran.

Berdasarkan hasil studi tersebut, jika pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) provinsi hasil pemekaran ingin meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka pemda yang bersangkutan harus bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan membuat program-program pemerintah yang membuat masyarakat dapat bersekolah lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Daryanto dan Y. Hafizrianda, *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*, Bogor: IPB Press, 2010.
- A.Widarjono, *Ekonomterika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua*, Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2007.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nations Development Programme, *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*, Jakarta: Building and Reinventing Decentralised Governance, 2008.
- D.N. Gujarati dan D.C.Porter, *Dasar-dasar Ekonometrika: Buku 2 Edisi 5, Terjemahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- H.R. Syaukani, A. Gaffar dan R. Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- M.Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010.
- M.Sidik, et.al, *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- T.T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009.

Artikel dalam jurnal:

- A.C.Cahyat, C. Gonner dan M. Haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, Center for International Forestry Research, 2007.
- A.G.Brata, *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol. 7, No. 2, 2002.
- F.A.Christy dan Adi P.H., *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*, The 3rd National Conference UKWMS Surabaya, October 10th 2009.
- J.Suryanto dan E. Soesilowati, *Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Empat Provinsi Pemekaran*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XVI(2), 2008.

P.T.Febiyansah, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Good Governance: Analisis Empiris di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XVIII (2), 2010.

Dokumen resmi:

Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi*, Jakarta: BPS, Agustus 2011.

Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi*, Jakarta: BPS, November 2010.

Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi*, Jakarta: BPS, Oktober 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Internet:

D.Harmantyo. "Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia" www.geografi.ui.ac.id/node/123, 2011 diakses tanggal 10 Januari 2012.

M.A.Abdullah, (2011), *Ringkasan: Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)*, http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/50365/2011maa_Ringkasan.pdf?sequence=12, diakses tanggal 10 Februari 2012.

Toddy. "Indikator Kesejahteraan Umum" www.bappeda.pekanbaru.go.id/artikel/8/indikator-kesejahteraan-umum/page/1/ di akses tanggal 8 Februari 2012.

www.bps.go.id

www.djpk.depkeu.go.id

